



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



MAMPUKAH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL MEMODERASI DETERMINAN YANG MEMENGARUHI KEUANGAN BERKELANJUTAN PERUSAHAAN PERBANKAN?

COULD THE INSTITUSIONAL OWNERHIP MODERATE THE DETERMINANTS THAT INFLUENCE SUSTAINABLE FINANCE OF BANKING COMPANIES ?

Ade Rosadi Alwi¹, Herlina Lusmeida^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan, Kota Tangerang, Indonesia

*Email: herlina.lusmeida@uph.edu

Keywords

Bank's Health Level, ROA, Tax Avoidance, Institutional Ownership, Sustainable Finance

Article informations

Received:

2025-06-24

Accepted:

2025-11-19

Available Online:

2025-11-25

Abstract

This research aims to provide the empirical evidence of the effect of bank's health level, financial performance, and tax avoidance on sustainable finance with institutional ownership as a moderating variable. The data sources used in this study are banking companies that have assets of at least 5 trillion rupiah and are registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) for the 2019-2023 period, with a total of 231 samples. The research data was processed using a multiple linear regression model, with the results of the study proving that Bank's Health Level have a negative effect on Sustainable Finance; Financial Performance has a positive effect on Sustainable Finance; Tax Avoidance and institutional ownership have no effect on Sustainable Finance; Institutional Ownership is unable to moderate the effect of Bank Health, financial performance and tax avoidance to sustainable finance. This study provides practical implications to encourage banking companies to increase their legitimacy through sustainable finance disclosures in their financial reports. This study also provides theoretical implication through stakeholder theory and institutional theory that bank as a financial institutional has to fulfil stakeholder needs, including monitoring mechanism by institutional ownership

PENDAHULUAN

Industri perbankan berperan sebagai sektor kunci dalam perekonomian suatu negara dengan menyediakan layanan keuangan, mendukung investasi, dan mendorong pertumbuhan bisnis (Kolamban et al., 2020). Kesehatan dan keberlanjutan operasional bank menjadi faktor utama yang menentukan kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi dinamika global dan tantangan ekonomi yang terus berkembang (A. Setiawan, 2017). Keuangan Berkelanjutan, sebagai ekosistem yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, bertujuan mendanai aktivitas berkelanjutan dan mendukung transisi



menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau. Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) dibentuk sebagai wadah bagi bank-bank, seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI, untuk menerapkan prinsip-prinsip perbankan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Keuangan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, merupakan penerapan prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak sosial serta lingkungan dari aktivitas keuangan. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang bertanggung jawab, di mana lembaga keuangan diharuskan untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan investasi maupun pemberian kredit. Tujuan utamanya adalah menciptakan manfaat jangka panjang yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lingkungan, serta pemilik modal.

Perbankan hijau, yang berfokus pada prinsip keberlanjutan, menekankan kesesuaian lingkungan dalam aktivitas kredit dan pendanaan (Karyani & Obrien, 2020). Meskipun aktivitas perbankan dapat berkontribusi pada pencemaran lingkungan, seperti pembiayaan industri berbahan bakar fosil (data.goodstats.id, 2023), beberapa bank telah mengambil langkah proaktif. Misalnya, Bank Mandiri menyediakan kredit senilai 6,1 triliun rupiah untuk proyek energi terbarukan guna mengurangi emisi CO₂, sementara Bank BNI mengalokasikan 10,2 triliun rupiah untuk debitur dengan proyek hijau (Bank Mandiri Sustainability Report, 2022; Bank BNI Sustainability Report, 2022). Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen perbankan dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Keuangan berkelanjutan merupakan sistem keuangan yang mengutamakan tiga aspek penting yaitu ekonomi, sosial dan tata kelola (Lusmeida & Siahaan, 2025). Bank sebagai lembaga keuangan bukan hanya mementingkan keuntungan tetapi harus mempertimbangkan keselarasan sosial dan tata kelola agar dapat sustain atau tangguh. Untuk itu perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan berkelanjutan bank.

Teori pemangku kepentingan pada dasarnya menekankan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab sosial dan moral terhadap seluruh pihak yang terpengaruh oleh aktivitas serta dampak operasionalnya. Dalam penerapannya, hal ini mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan mereka, tidak hanya dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga terhadap kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, serta kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan (Hawkins, 2006). Melalui penerapan prinsip ini, perusahaan diharapkan mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang, sekaligus membangun hubungan yang lebih harmonis dengan seluruh pihak dalam ekosistem bisnisnya.

Teori institusional (*Institutional Theory*) merupakan suatu kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga seperti aturan, norma, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dapat membentuk perilaku dan struktur organisasi (DiMaggio & Powell, 1983). Teori ini menyoroti bahwa organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti strategi maupun struktur, tetapi juga oleh tekanan serta ekspektasi dari lingkungan eksternal. Dalam konteks tersebut, institusi dapat mencakup regulasi pemerintah, budaya organisasi, maupun praktik industri yang dianggap sebagai standar atau norma oleh para pemangku kepentingan.

Tingkat kesehatan bank, yang mencakup kemampuan memenuhi kewajiban, mengelola risiko, dan memperoleh keuntungan berkelanjutan, menjadi penentu stabilitas sistem keuangan (Georgios & Elvis, 2019). Kinerja keuangan, yang dievaluasi melalui metrik seperti pendapatan dan rasio keuangan, juga memengaruhi efisiensi dan produktivitas bank (Bătae et al., 2021). Di sisi lain, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang legal dapat memengaruhi persepsi terhadap komitmen etis bank (Beer et al., 2020). Kepemilikan institusional, sebagai variabel moderasi, berperan dalam memengaruhi keputusan manajemen bank untuk mengadopsi praktik

keuangan berkelanjutan (Pratomo & Nuraulia, 2021). Pandemi COVID-19 turut memengaruhi fokus perbankan, dengan tekanan likuiditas dan profitabilitas mengalihkan perhatian dari inisiatif keberlanjutan jangka panjang.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi, penelitian yang dilakukan oleh Mulia (2019) dan Saputri (2019), menemukan bahwa Tingkat Kesehatan Bank berperan positif terhadap Keuangan Berkelanjutan. Akan tetapi, temuan yang berbeda diungkapkan oleh penelitian terbaru Andayani (2023), yang menegaskan bahwa Tingkat Kesehatan Bank tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, Saputri (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan Kinerja Keuangan berperan negatif untuk kemampuan berkelanjutan perusahaan. Berkebalikan dengan itu, Sholikhah & Miranti (2020) mengungkapkan Kinerja Keuangan berperan positif untuk kemampuan berkelanjutan perusahaan. Di sisi lain, terkait dengan Tax Avoidance, (Mgbame et al., 2017) mengatakan terdapat hubungan negatif pada kinerja keberlanjutan dan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian (Maheresmi et al., 2023) mengungkapkan tax avoidance tidak memberi efek signifikan terhadap pengungkapan keuangan berkelanjutan

Penelitian ini penting dilakukan karena masing-masing variabel mencerminkan aspek-aspek kunci dari manajemen perbankan yang berdampak pada keberlanjutan perusahaan. Tingkat kesehatan bank dan kinerja keuangan, misalnya, memberikan gambaran stabilitas keuangan dan kemampuan bank dalam mendukung inisiatif keberlanjutan. Sementara itu, praktik penghindaran pajak dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan regulator terhadap komitmen etis bank, yang penting dalam reputasi berkelanjutan. Kepemilikan institusional berperan sebagai moderasi untuk memperkuat/melemahkan pengaruh karena pemegang saham institusional cenderung memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan keberlanjutan.

Walaupun regulasi terkait keuangan berkelanjutan semakin mendapat perhatian, bukti empiris mengenai peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dan kinerja keberlanjutan masih terbatas, khususnya di pasar berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) dan teori institusional (*Institutional Theory*) sebagai landasan untuk menjelaskan bank sebagai salah satu lembaga keuangan harus memperhatikan kebutuhan dari stakeholdernya dengan menerapkan keuangan berkelanjutan dimoderasi oleh kepemilikan institusional.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Menurut *Stakeholder Theory*, organisasi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan nilai tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Bank yang memiliki tingkat kesehatan tinggi menunjukkan stabilitas finansial dan manajemen risiko yang baik, sehingga mampu memenuhi ekspektasi para stakeholder dengan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung praktik keuangan berkelanjutan.

Tingkat kesehatan bank berpengaruh positif terhadap keuangan berkelanjutan karena bank yang sehat memiliki kemampuan finansial dan manajemen risiko yang lebih baik, sehingga mampu mengalokasikan sumber daya untuk mendukung inisiatif keberlanjutan. Bank dengan kondisi keuangan yang stabil cenderung memiliki likuiditas dan profitabilitas yang memadai, memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial yang memerlukan pendanaan jangka panjang (Georgios & Elvis, 2019). Selain itu, bank yang sehat juga lebih mampu memenuhi regulasi dan tuntutan stakeholders terkait praktik berkelanjutan, sehingga meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik yang pada akhirnya mendorong implementasi keuangan berkelanjutan secara lebih efektif.

Hal ini sejalan dengan riset dari Mulia (2019) dan Saputri (2019) berkesimpulan bahwa



Tingkat Kesehatan Bank memengaruhi secara positif Keuangan Berkelanjutan. Ini mengindikasikan bahwa kondisi finansial dan operasional yang mencerminkan tingkat kesehatan bank memiliki dampak langsung yang penting terhadap komitmen bank terhadap praktik keuangan berkelanjutan untuk mendukung aset-aset yang memiliki risiko, seperti kredit atau pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat Kesehatan Bank berpengaruh positif terhadap Keuangan Berkelanjutan

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Dalam perspektif Stakeholder Theory, kinerja keuangan yang baik memungkinkan perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan lebih efektif karena adanya kapasitas finansial yang cukup untuk berinvestasi dalam proyek berkelanjutan. Kinerja yang positif juga meningkatkan kepercayaan stakeholder, memperkuat legitimasi sosial, dan memperluas peluang untuk menciptakan nilai jangka panjang.

Dari sisi Institutional Theory, tekanan normatif dan regulatif dari lingkungan bisnis menuntut perusahaan dengan kinerja kuat untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik keberlanjutan sebagai bagian dari kepatuhan dan reputasi kelembagaan. Dengan demikian, semakin baik kinerja keuangan perusahaan, semakin besar kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan institusional dan ekspektasi stakeholder terkait keberlanjutan.

Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap keuangan berkelanjutan karena bank atau perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik memiliki sumber daya yang memadai untuk menginvestasikan dana dalam inisiatif-inisiatif berkelanjutan, seperti proyek ramah lingkungan atau program sosial. Tingkat profitabilitas, efisiensi, dan stabilitas keuangan yang tinggi memungkinkan mereka untuk mengalokasikan anggaran lebih besar bagi pengembangan praktik keberlanjutan tanpa mengorbankan operasional inti (Saputri, 2019). Selain itu, kinerja keuangan yang kuat juga meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholders, yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan upaya menjaga reputasi jangka panjang.

Seperti yang diungkapkan dalam temuan riset Sholikhah & Miranti (2020) dan Mulia (2019) dengan pernyataan bahwa Kinerja Keuangan memengaruhi ekonomi sebuah perusahaan. Di dalam hasil penelitian, Kinerja Keuangan terlihat memengaruhi secara positif keuangan berkelanjutan. Hal tersebut artinya bank-bank yang memiliki profitabilitas tinggi akan mampu mengungkapkan keberlanjutan keuangan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pengembalian atas aset yang dimiliki, kian tinggi pula jumlah profit yang diperoleh di tiap modal. Begitu pula apabila tingkat pengembalian atas aset lebih rendah, artinya jumlah laba bersih yang dihasilkan akan lebih rendah. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Keuangan Berkelanjutan

Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Stakeholder Theory menilai bahwa praktik tax avoidance bertentangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan karena mengabaikan kontribusi terhadap masyarakat dan negara. Hal ini dapat menurunkan legitimasi sosial serta kepercayaan stakeholder, sehingga melemahkan upaya menuju keuangan berkelanjutan.

Tax avoidance berpengaruh negatif terhadap keuangan berkelanjutan karena praktik ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan stakeholders, termasuk masyarakat dan regulator, terhadap komitmen etis perusahaan. Ketika perusahaan terlihat menghindari dari kewajiban pajaknya, hal ini dapat dianggap sebagai upaya mengorbankan tanggung jawab sosial untuk keuntungan pribadi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

keberlanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial (Thakur dan Workman, 2016). Selain itu, pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan pemerintah untuk mendanai program-program berkelanjutan, seperti infrastruktur hijau atau energi terbarukan, menjadi berkurang, sehingga secara tidak langsung menghambat upaya kolektif menuju pembangunan berkelanjutan.

Terkait hal ini, (Mgbame et al., 2017) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak dapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keberlanjutan. Penelitian ini mengimplikasikan apabila penghindaran pajak dilakukan akan mempengaruhi tingkat kinerja keberlanjutan itu sendiri secara negatif. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Tax Avoidance berpengaruh negatif terhadap Keuangan Berkelanjutan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Menurut *Stakeholder Theory*, pemilik institusional memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa perusahaan yang mereka investasikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan stakeholder secara luas. Namun, dalam praktiknya, kepemilikan institusional seringkali lebih berorientasi pada pencapaian laba cepat, yang dapat menekan manajemen untuk mengabaikan inisiatif keberlanjutan.

Sementara itu, *Institutional Theory* menunjukkan bahwa orientasi pemegang saham institusional terhadap kinerja keuangan dapat menciptakan tekanan koersif internal yang melemahkan dorongan terhadap legitimasi sosial. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat berpotensi menghambat penerapan keuangan berkelanjutan.

Kepemilikan insitusi-institusi memiliki peran signifikan dalam operasi bisnis di sektor keuangan. Perusahaan yang mayoritas sahamnya juga dimiliki oleh institusi-institusi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan representasi dari institusi-institusi tersebut dalam menjalankan tata kelola usahanya (Amidjaya & Widagdo, 2020).

Kepemilikan institusional dapat berpengaruh negatif terhadap keuangan berkelanjutan jika fokus para pemilik institusional lebih condong pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pemilik institusional yang mengejar hasil finansial cepat mungkin mendorong perusahaan untuk memprioritaskan efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan perusahaan, yang terkadang bertentangan dengan praktik bisnis berkelanjutan (Muttakin & Subramaniam, 2015). Riset terdahulu oleh (Eng & Mak, 2023) dan (Derry & Vinola, 2021) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusi memiliki efek negatif pada pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Keuangan Berkelanjutan

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusional pada Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Dari sudut pandang *Stakeholder Theory*, bank yang sehat semestinya berkomitmen lebih besar terhadap keberlanjutan karena memiliki tanggung jawab sosial terhadap berbagai pihak. Namun, *Institutional Theory* menjelaskan bahwa tekanan internal dari pemegang saham institusional dapat mengubah arah keputusan manajemen. Jika institusi pemilik lebih menekankan profit jangka pendek, maka dorongan etis dari stakeholder dapat terpinggirkan.

Kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh positif tingkat kesehatan bank terhadap keuangan berkelanjutan karena pemegang saham institusional, seperti perusahaan atau lembaga keuangan besar, seringkali lebih fokus pada tujuan jangka pendek seperti maksimisasi laba dan Return on Investment (ROI) daripada inisiatif keberlanjutan jangka panjang. Ketika kepemilikan institusional dominan, tekanan untuk mencapai target keuangan jangka pendek



dapat mengalihkan perhatian manajemen bank dari investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasil (Amidjaya & Widagdo, 2020). Selain itu, keputusan strategis cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pemegang saham institusional, yang mungkin kurang memprioritaskan aspek lingkungan dan sosial, sehingga melemahkan hubungan antara kesehatan bank dan implementasi keuangan berkelanjutan.

Penelitian yang dikemukakan oleh Mulia (2019) dan (Saputri, 2019) menyimpulkan bahwa variabel Tingkat Kesehatan Bank terhadap Keuangan Berkelanjutan memiliki pengaruh yang positif. Sebuah penelitian oleh Tandoh et al. (2022) menyimpulkan kepemilikan institusional memperlemah peran tingkat kesehatan bank bagi keuangan berkelanjutan. Institusi cenderung kurang menerapkan keuangan berkelanjutan karena fokus mereka sering kali lebih condong pada keuntungan jangka pendek dan pengembalian investasi, sehingga mengabaikan investasi jangka panjang yang mendukung keberlanjutan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kepemilikan Institusional memperlemah pengaruh positif Tingkat Kesehatan Bank terhadap Keuangan Berkelanjutan

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusional pada Kinerja Keuangan Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Menurut Stakeholder Theory, kinerja keuangan yang tinggi seharusnya menjadi katalis bagi praktik keberlanjutan karena memungkinkan pemenuhan tanggung jawab sosial. Namun, Institutional Theory menyoroti bahwa dalam konteks kepemilikan institusional, tekanan dari pemegang saham besar dapat mengalihkan fokus dari tujuan keberlanjutan menuju optimalisasi laba jangka pendek.

Ketika tekanan koersif dari pemilik institusional mendominasi, hubungan positif antara kinerja keuangan dan keuangan berkelanjutan menjadi lemah karena orientasi profit menekan investasi jangka panjang yang bersifat sosial dan lingkungan.

Kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap keuangan berkelanjutan karena pemegang saham institusional cenderung lebih fokus pada pencapaian target keuangan jangka pendek, seperti laba dan Return on Investment (ROI), daripada investasi dalam inisiatif keberlanjutan yang memerlukan waktu lebih lama untuk memberikan hasil. Tekanan dari pemegang saham institusional untuk memaksimalkan keuntungan dalam waktu singkat dapat mengalihkan alokasi sumber daya perusahaan dari proyek-proyek berkelanjutan, yang seringkali memerlukan biaya awal tinggi dan manfaat jangka panjang (Muttakin & Subramaniam, 2015). Akibatnya, meskipun kinerja keuangan perusahaan baik, keputusan strategis lebih dipengaruhi oleh kepentingan pemegang saham institusional yang kurang memprioritaskan aspek lingkungan dan sosial, sehingga melemahkan hubungan antara kinerja keuangan dan implementasi keuangan berkelanjutan.

Temuan terdahulu dari Derry & Vinola (2021) menyatakan bahwa tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan nilai saham atau dividen juga dapat mengurangi prioritas terhadap program keberlanjutan, yang sering membutuhkan biaya tinggi dan waktu lebih lama untuk memberikan manfaat nyata bagi institusi. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Kepemilikan Institusional memperlemah pengaruh positif Kinerja Keuangan terhadap Keuangan Berkelanjutan

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Dalam kerangka *Stakeholder Theory*, *tax avoidance* merupakan bentuk perilaku yang mengabaikan kepentingan publik, sementara Institutional Theory menyoroti bahwa tekanan

dari pemegang saham institusional dapat memperkuat praktik tersebut demi efisiensi pajak dan peningkatan laba jangka pendek.

Ketika kepemilikan institusional tinggi, dorongan untuk memaksimalkan keuntungan melalui penghindaran pajak dapat semakin kuat, sehingga memperbesar dampak negatif praktik tersebut terhadap komitmen keberlanjutan perusahaan. Dengan kata lain, tekanan koersif dan mimetik dari institusi keuangan besar dapat memperkuat pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap keuangan berkelanjutan.

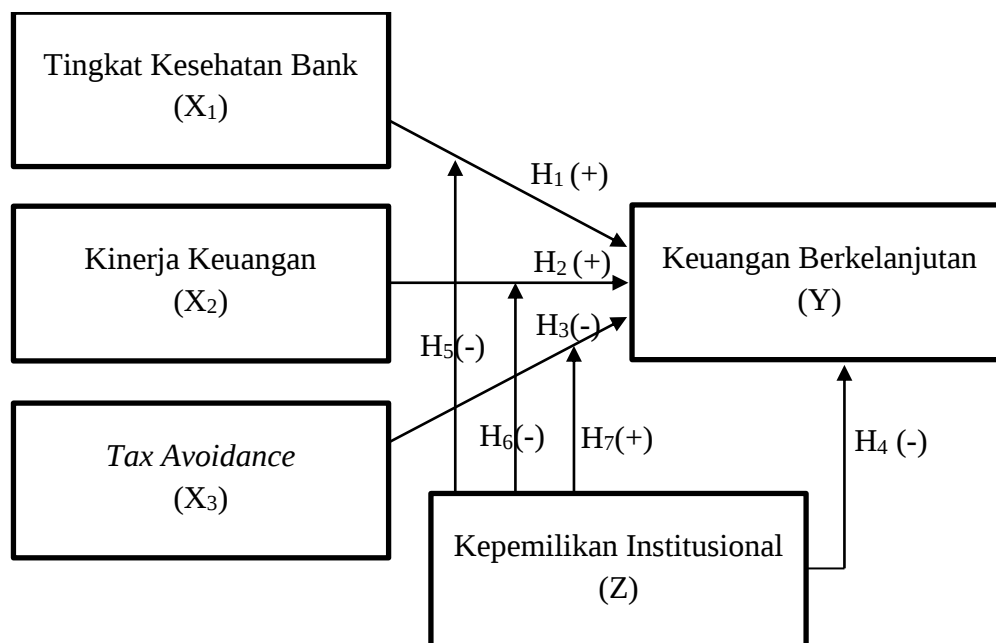
Temuan terdahulu dari (Li et al., 2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat praktik *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang berdampak pada praktik keuangan berkelanjutan karena institusi pemilik sering kali memiliki fokus utama pada peningkatan profitabilitas. Penelitian yang mendukung hubungan ini menunjukkan bahwa tekanan dari pemegang saham institusional sering kali menyebabkan perusahaan mengutamakan efisiensi pajak dibanding investasi keberlanjutan. Akibatnya, prioritas terhadap keuangan berkelanjutan menjadi terpinggirkan, memperlemah komitmen bank terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh negatif *Tax Avoidance* terhadap Keuangan Berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat sekunder. Data yang dibutuhkan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan website masing-masing perusahaan. Secara sistematis kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual seperti yang tergambar dalam skema gambar 1, terdapat tiga kategori variabel. Pertama, terdapat variabel independen atau bebas yang merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh bagi variabel terikat. Di sini, variabel bebas mencakup Tingkat Kesehatan Bank (X_1), Kinerja Keuangan (X_2) dan *Tax Avoidance* (X_3). Kedua, terdapat

variabel terikat yang menjadi atau terkena pengaruh variabel bebas. Menurut konteks di sini, yang menjadi variabel dependen adalah Keuangan Berkelanjutan (Y). Ketiga, terdapat variable moderasi yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kedua jenis variabel. Dalam hal ini variable moderasinya adalah Kepemilikan Institusional.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan di sektor perbankan yang listing di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan 47 perusahaan dengan periode 5 tahun, sehingga jumlah observasi data berjumlah 235 data, namun terdapat 4 perusahaan perbankan yang dalam periode terkait tidak menyajikan informasi terkait kredit keberlanjutan yang disalurkan, sehingga jumlah sampel data yang diambil adalah sebanyak 231 data.

Tabel 1.
Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Total perusahaan perbankan di Indonesia yang memiliki aset diatas 5 triliun rupiah yang menerbitkan laporan keuangan/laporan tahunan/laporan keberlanjutan dan terdaftar di OJK periode 2019-2023	47
2	Jumlah Periode Penelitian Total Observasi (47 x 5)	5 235
3	Dikurangi dengan perusahaan perbankan yang dalam periode terkait tidak menyajikan informasi terkait kredit keberlanjutan yang disalurkan	(4)
Total data yang diteliti (235 – 4)		231

Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, teknik tersebut merupakan teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan beberapa kriteria peneliti (Sekaran dan Bougie, 2016). Tipe data yang diteliti adalah data sekunder, di mana datanya sudah ada dan peneliti kutip untuk keperluan penelitian. Peneliti tidak mengumpulkan data asli, melainkan data ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Memperolehnya ialah dari situs resmi perusahaan perbankan terkait. Data yang penulis kumpulkan ialah data sekunder dari laporan keuangan/laporan tahunan/laporan keberlanjutan perusahaan perbankan periode 2019-2023.

Model Empiris Penelitian

Penelitian ini menguji secara empiris apakah tingkat kesehatan bank, kinerja keuangan dan Tax Avoidance memengaruhi kinerja keuangan berkelanjutan perusahaan yang beroperasi pada sektor perbankan yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Model empiris penelitian ini, yaitu:

Model empiris penelitian 1:

$$SF = \alpha + \beta_1 TKB + \beta_2 KK + \beta_3 TA + \beta_4 KI + \beta_5 SIZE + \beta_6 AGE + \beta_7 LK + \beta_8 COVID + e \dots\dots\dots (1)$$

Model empiris penelitian 2:

$$SF = \alpha + \beta_1 TKB + \beta_2 KK + \beta_3 TA + \beta_4 KI + \beta_5 TKB * KI + \beta_6 KK * KI + \beta_7 TA * KI + \beta_8 SIZE + \beta_9 AGE + \beta_{10} LK + \beta_{11} COVID + e \dots\dots\dots (2)$$

Ket: SF = Sustainable Finance; α = Konstanta; β_1 - β_{11} = Koefisien; TKB = Tingkat Kesehatan Bank; KK = Kinerja Keuangan; TA = Tax Avoidance; KI = Kepemilikan Institusional; SIZE = Ukuran Perusahaan; AGE = Umur Perusahaan; LK = Likuiditas; COVID = Pengaruh Covid

Penelitian menggunakan dua persamaan empiris penelitian, model satu persamaan empiris tanpa interaksi moderasi, sedangkan model dua persamaan empiris dengan interaksi

moderasi. Data diolah dengan menggunakan software SPSS Versi 25.

Metode Analisis Data

Regresi linear berganda digunakan oleh peneliti untuk melihat perubahan variabel dependen atau melakukan analisis regresi linear berganda ketika terdapat minimal dua variabel independen. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen seperti Tingkat Kesehatan Bank (X1), Kinerja Keuangan (X2), dan Tax Avoidance (X3) terhadap variabel dependen, yaitu Keuangan Berkelanjutan yang dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional (Sugiyono, 2018).

Analisis statistik deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum atau ringkasan tentang data, dengan menghitung parameter seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi (Sugiyono, 2017).

Dalam analisis regresi linier berganda, penting untuk memenuhi asumsi-asumsi tertentu agar estimasi variabel dependen berdasarkan variabel independen dapat dianggap optimal. Aspek-aspek ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

Setelah melakukan uji asumsi klasik, dilakukan uji hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi, uji F dan uji T.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Keuangan Berkelanjutan

Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan adalah sebuah sistem dengan dukungan menyeluruh yang diberikan oleh lembaga keuangan yang sejalan dengan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam pembiayaan program berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan dapat diukur dengan jumlah penyaluran kredit untuk kegiatan usaha berkelanjutan dibagi dengan jumlah kredit yang disalurkan secara total (Praptiningsih et al., 2022). Rumus yang dipakai, yaitu:

$$\text{Financial Sustainability} = \frac{\text{Kredit Kegiatan Usaha Berkelanjutan}}{\text{Kredit total}}$$

Variabel Independen

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel independen, yaitu Tingkat Kesehatan Bank (X1), Kinerja Keuangan (X2) dan Tax Avoidance (X3). Penjelasan dari masing-masing variabel diantaranya:

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR ialah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, ATMR adalah singkatan dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, yang merupakan jumlah aset bank dengan mempertimbangkan risiko masing-masing aset (Andayani, 2023). Rumus yang dipakai, yaitu:

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan bisa diukur dengan *Return on Asset (ROA)*. Ini merupakan rasio untuk laba bersih terhadap total aset perusahaan. Dengan cara ini, dapat diperlihatkan seberapa efisien perusahaan memperoleh profit berdasarkan nilai aset yang dimilikinya (Praptiningsih et al., 2022). Rumus yang dipakai, yaitu:



$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan kegiatan yang merujuk pada praktik legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan secara optimal (Jasmine, 2017). Praktik *Tax Avoidance* bisa diukur dengan metode *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. *CETR* adalah biaya pajak yang dikeluarkan secara kas dibagi dengan laba sebelum pajak (Maheresmi et al., 2023). Rumus yang dipakai, yaitu:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Secara Kas}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Moderasi

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi-institusi di luar perusahaan merupakan pengertian dari kepemilikan institusional. Dengan adanya pihak eksternal yang memiliki sebagian kepemilikan saham pada perusahaan terkait, dapat mengontrol adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak internal (Brigham, 2005). Rumus yang dipakai, yaitu:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan hasil olah data yang sudah dilakukan dalam penelitian ini maka berikut ditampilkan tiga tabel yang meliputi tabel hasil uji statistik deskriptif, tabel hasil uji analisis korelasi pearson dan hasil uji hipotesis.

Tabel 2.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variable	Observation	Mean	Std. dev.	Min	Max
TKB	231	0.181	0.036	0.106	0.294
KK	231	0.019	0.007	0.004	0.0403
TA	231	0.184	0.036	0.108	0.285
SF	231	0.156	0.034	0.078	0.254
KI	231	0.511	0.102	0.181	0.775
SIZE	231	32.130	0.657	30.609	33.974
AGE	231	50.095	22.41	10	128
LK	231	1.331	0.174	0.959	1.812
Covid	231	0.411	0.493	0	1

Sumber: Data yang diolah Penulis, 2024

Tabel 2 dapat menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank mengukur kesehatan bank, dengan nilai minimum 0.106 oleh Bank ANZ Indonesia periode 2022 dan nilai maksimum 0.294 Bank Central Asia periode 2023. Nilai rata-rata Tingkat Kesehatan Bank yang dihasilkan adalah 0.181. Standar deviasinya sebesar 0.036, menunjukkan sebaran nilai tingkat kesehatan bank. Kinerja Keuangan mengukur performa keuangan sebuah bank, dengan nilai minimum yang diuji senilai 0.004 oleh Bank Maspion periode 2023 dan nilai maksimum 0.041 oleh Bank Mandiri pada periode 2023. Rata-rata nilai adalah 0.019, yang menunjukkan kinerja keuangan rata-rata. Standar deviasi adalah 0.006, menunjukkan sebaran kinerja keuangan. Tax Avoidance mengukur pengaruh praktik Tax Avoidance terhadap Keuangan Berkelanjutan, dengan nilai minimum yang dihasilkan adalah 0.108 oleh Bank Danamon Indonesia periode 2020 dan nilai maksimum 0.285 oleh Bank ICBC Indonesia periode 2022. Nilai rata-rata Tax Avoidance yang dihasilkan adalah 0.183. Standar deviasinya adalah 0.036. Keuangan Berkelanjutan mengukur

tingkat praktik keuangan berkelanjutan bank, dengan nilai minimum 0.077 oleh Bank Commonwealth periode 2021 dan nilai maksimum 0.254 oleh Bank Central Asia periode 2022. Rata-rata nilai adalah 0.156. Standar deviasinya senilai 0.034.

Kepemilikan Institusional mengukur tingkat kepemilikan saham institusi pada sebuah bank, dengan nilai minimum 0.181 oleh Bank JTrust Indonesia periode 2020 dan nilai maksimum 0.775 oleh Bank Mandiri periode 2021. Rata-rata nilai adalah 0.511, yang menunjukkan tingkat kepemilikan institusi rata-rata. Standar deviasi adalah 0.102, menunjukkan sebaran tingkat kepemilikan institusi. Ukuran Perusahaan (SIZE) mengukur nilai aset suatu perusahaan, dengan nilai minimum 30.608 oleh Bank ICBC Indonesia periode 2019 dan nilai maksimum 33.974 oleh Bank Mandiri periode 2023. Rata-rata nilai adalah 32.130, yang menunjukkan nilai ukuran perusahaan rata-rata. Standar deviasi adalah 0.657, menunjukkan sebaran nilai ukuran perusahaan. Umur Perusahaan (AGE) memiliki nilai minimum 10 oleh Bank BCA Syariah periode 2020 dan nilai maksimum 128 oleh Bank Rakyat Indonesia periode 2023. Rata-rata nilai adalah 50.095, yang menunjukkan umur perusahaan rata-rata. Standar deviasi sebesar 22.41, menunjukkan sebaran nilai umur perusahaan. Likuiditas (LK) mengukur kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, Likuiditas memiliki nilai minimum 0.959 oleh Bank CTBC Indonesia periode 2022 dan nilai maksimum 1.812 oleh Bank Mayapada International periode 2021. Rata-rata nilai yang dihasilkan adalah sebesar 1.331. Standar deviasi adalah 0.174, menunjukkan sebaran nilai Likuiditas. Variabel Covid mengukur pengaruh covid dalam model penelitian, variabel covid memiliki nilai minimum 0, nilai 0 diberikan pada tahun yang tidak terpengaruh oleh covid, seperti pada tahun 2019, 2022 dan 2023 dalam penelitian. Sedangkan nilai maksimum adalah 1, nilai 1 diberikan pada tahun yang terdampak covid, seperti pada tahun 2020 dan 2021. Rata-rata nilai covid adalah 0.411. Standar deviasinya sebesar 0.493.

Tabel 3.

Hasil Uji Analisis Korelasi Pearson

	TKB	KK	TA	SF	KI	SIZE	AGE	LK	Covid
TKB	1.0000								
KK	0.1419	1.0000							
	0.0311								
TA	0.0915	-0.0227	1.0000						
	0.1659	0.7317							
SF	-0.7391	-0.0794	-0.1821	1.0000					
	0.0000	0.2293	0.0055						
KI	-0.0466	-0.0047	-0.0291	0.0339	1.0000				
	0.4811	0.9431	0.6602	0.6080					
SIZE	-0.0206	0.1324	-0.0258	0.0030	0.0773	1.0000			
	0.7557	0.0444	0.6961	0.9643	0.2421				
AGE	0.6100	-0.0341	0.0192	-0.4860	0.0391	0.1020	1.0000		
	0.0000	0.6062	0.7712	0.0000	0.5546	0.1222			
LK	-0.0197	-0.1079	-0.0156	-0.0116	-0.0682	-0.1682	0.0173	1.0000	
	0.7658	0.1018	0.8133	0.8607	0.3021	0.0105	0.7940		
Covid	-0.0301	0.0513	-0.1189	0.0465	0.0701	0.0617	-0.0174	0.0025	1.0000
	0.6488	0.4374	0.0712	0.4816	0.2885	0.3508	0.7920	0.9698	

Sumber : Data yang diolah Penulis, 2024

Dari Tabel 3 dapat dilihat hubungan antara KK dengan SF menampilkan hasil korelasi yang tidak signifikan dibuktikan dengan nilai sig. (2-tailed) $0.2293 > 0.1$. Kemudian hubungan tax avoidance (TA) dengan SF memiliki nilai sig. (2- tailed) $0.0055 < 0.1$ yang memperlihatkan terdapat korelasi yang signifikan. Hubungan ukuran perusahaan (SIZE) dengan SF memiliki nilai signifikasi $0.9643 > 0.1$ yang artinya tidak ada korelasi. Hubungan selanjutnya antara AGE dengan SF memiliki korelasi signifikan dengan nilai sig. (2-tailed) $.000 < 0.1$, yang artinya terdapat korelasi signifikan. Hubungan antara LK dengan SF dengan nilai sig. (2- tailed) 0.8607



> 0.1 membutuhkan tidak ada korelasi yang signifikan dan hubungan Covid dengan SF juga tidak menunjukkan korelasi signifikan dengan nilai sig. (2- tailed) $0.4816 > 0.1$. Koefisien korelasi yang paling besar nilainya adalah 1 (satu) yang menandakan hubungan yang sempurna. Pada tabel 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa hubungan TKB dengan TKB, KK dengan KK, TA dengan TA, SF dengan SF, KI dengan KI, SIZE dengan SIZE, AGE dengan AGE, LK dengan LK dan Covid dengan Covid memiliki koefisien korelasi sebesar 1.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan masalah korelasi antar variabel. Koefisien korelasi yang paling besar nilainya adalah 1 (satu) yang menandakan hubungan yang sempurna. Variabel TKB dengan variabel KK memiliki nilai koefisien sebesar 0.1419 yang dimana angka ini lebih kecil daripada 1. Variabel TKB dengan variabel TA memiliki nilai koefisien 0.0915. TKB dengan variabel SF memiliki nilai koefisien sebesar -0.7391. TKB dengan KI memiliki nilai koefisien sebesar -0.0466. Selanjutnya TKB dengan variabel kontrol yaitu, SIZE, AGE, LK, dan Covid memiliki nilai koefisien secara berurut sebagai berikut negatif -0.0206, 0.6100, -0.0197, dan -0.0301. Variabel KK memiliki koefisien sebesar -0.0227 terhadap variabel TA. KK memiliki koefisien sebesar -0.0794 terhadap SF dan -0.0047 terhadap variabel KI. Variabel KK dengan variabel kontrol SIZE, AGE, LK, Covid memiliki nilai koefisien secara berurut sebagai berikut; 0.1324, -0.0341, -0.1079, dan 0.0513. Terlihat bahwa Variabel KK juga tidak memiliki masalah korelasi dengan variabel-variabel lainnya, dan juga berlaku sebaliknya.

Variabel TA dengan variabel SF memiliki nilai koefisien -0.1821. Variabel TA dengan KI memiliki koefisien sebesar -0.0291. Variabel TA dengan variabel kontrol SIZE, AGE, LK, Covid memiliki nilai koefisien secara berurut sebagai berikut: -0.0258, 0.0192, -0.0156, dan -0.1189. Variabel SF dengan KI memiliki nilai koefisien sebesar -0.0291. Variabel SF dengan variabel kontrol SIZE, AGE, LK, Covid memiliki nilai koefisien secara berurut sebagai berikut: 0.0030, -0.4860, -0.0116, dan 0.0465. Variabel KI dengan variabel kontrol SIZE, AGE, LK, Covid memiliki nilai koefisien secara berurut sebagai berikut, 0.0773, 0.0391, -0.0682 dan 0.0701. Dari sisi variabel kontrol, secara urut nilai koefisien korelasi antara Variabel SIZE dengan AGE, LK, Covid adalah sebagai berikut, 0.1020, -0.1682 dan 0.0617. Sedangkan, koefisien nilai antara variabel AGE dengan LK dan Covid adalah sebagai berikut, 0.0173 dan -0.0174. Variabel kontrol LK memiliki nilai koefisien sebesar 0.0025 dengan variabel Covid. Hal ini menunjukkan untuk korelasi semua variabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya masalah korelasi.

Tabel 4.

Hasil Uji T

Independent Variable	Predicted Sign	Model 1		Model 2	
		Dependent Variable Coef	Prob	Dependent Variable Coef	Prob
_cons	+	2.649899	0.000***	3.857401	0.000***
TKB	+	-4.970574	0.000	-13.05024	0.000
KK	+	.5330416	0.386	15.89292	0.081*
TA	-	.8298225	0.010	-1.376182	0.274
KI	-	-.0028269	0.490	-1.535391	0.143
KI*TKB	-			9.261394	0.001
KI*KK	-			-5.300506	0.102
KI*TA	+			-2.456865	0.182
SIZE		-.0061034	0.367	-.00389	0.413
AGE		-.0089996	0.335	-.0049003	0.298
LK		-.0404472	0.273	-.0519656	0.218
Covid		.0057709	0.201	.0117215	0.305
F-value		35.77		28.24	
Prob > F		.0000		.0000	

Independent Variable	Predicted Sign	Model 1		Model 2	
		Dependent Variable Coef	Dependent Variable Prob	Dependent Variable Coef	Dependent Variable Prob
_cons	+	2.649899	0.000***	3.857401	0.000***
R-squared		0.5631		0.5865	
Adj. R-squared		0.5474		0.5657	
N		231		231	

***, **, * merupakan tingkat nilai signifikansi 1%, 5% dan 10 %

Sumber : Data yang diolah Penulis, 2024

Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Mengacu pada tabel 4, bahwa variabel TKB menghasilkan nilai koefisien -13.05024 dan nilai signifikansi senilai 0.000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.01 ini dapat disimpulkan bahwa TKB berpengaruh negatif terhadap SF.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori *Stakeholder Theory*, organisasi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan nilai tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Bank yang memiliki tingkat kesehatan tinggi menunjukkan stabilitas finansial dan manajemen risiko yang baik, sehingga mampu memenuhi ekspektasi para stakeholder dengan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung praktik keuangan berkelanjutan.

Tingkat Kesehatan Bank berpengaruh secara negatif terhadap keuangan berkelanjutan, mengindikasikan bahwa bank lebih konservatif dalam pengelolaan modalnya, dengan memprioritaskan cadangan modal yang lebih tinggi untuk mengantisipasi risiko. Meskipun ini meningkatkan stabilitas finansial jangka pendek bank, bank mungkin mengurangi jumlah pembiayaan yang dialokasikan untuk proyek-proyek berkelanjutan atau inovatif yang berisiko lebih tinggi. Hal ini tentu bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Saputri (2019) dan Mulia (2019) yang menyatakan bahwa Tingkat Kesehatan Bank berpengaruh positif terhadap Keuangan Berkelanjutan.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Mengacu pada tabel 4, bahwa variabel KK menghasilkan nilai koefisien 15.89292 signifikansi KK terhadap SF adalah sebesar 0.08. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.1 ini dan nilai koefisien yang dihasilkan sebesar 15.89292, maka dapat disimpulkan bahwa KK memiliki pengaruh yang bersifat positif terhadap SF.

Pada hasil penelitian diatas, Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Keuangan Berkelanjutan. Hal tersebut dapat mendukung teori stakeholder karena kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan (dalam hal ini bank) memiliki kapasitas dan stabilitas untuk memenuhi kebutuhan dan harapan berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut teori stakeholder, perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, baik itu pemegang saham, karyawan, konsumen, regulator, maupun komunitas lokal, sehingga terdorong untuk mempraktikkan keuangan berkelanjutan.

Kinerja keuangan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan operasionalnya. Dengan memastikan pendapatan yang stabil dan efisiensi biaya yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang sehat memiliki sumber daya yang lebih besar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan, seperti inisiatif energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, atau program tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu oleh Mulia (2019) dan Sholikhah & Miranti (2020).

Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Keuangan Berkelanjutan



Dari tabel 4, *Tax Avoidance (TA)* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.274 berarti lebih besar dari 0.1, maka dapat diputuskan bahwa TA tidak berpengaruh signifikan terhadap SF.

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* tidak mempengaruhi praktik Keuangan Berkelanjutan. Stakeholder Theory menilai bahwa praktik tax avoidance bertentangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan karena mengabaikan kontribusi terhadap masyarakat dan negara. Hal ini dapat menurunkan legitimasi sosial serta kepercayaan stakeholder, sehingga melemahkan upaya menuju keuangan berkelanjutan.

Hasil uji Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mungkin terlibat dalam penghindaran pajak, tekanan institusional atau harapan masyarakat terkait tanggung jawab sosial perusahaan, mendorong mereka untuk tetap berinvestasi dalam pembiayaan berkelanjutan.

Praktik *tax avoidance* dalam perusahaan perbankan sering dianggap tidak mempengaruhi komitmen mereka terhadap praktik keuangan berkelanjutan karena kedua hal tersebut menasar aspek yang berbeda dalam operasional dan tanggung jawab perusahaan. *Tax avoidance* adalah strategi legal untuk meminimalkan pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan, sementara praktik keuangan berkelanjutan bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam kebijakan keuangan bank. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Maheresmi et al. (2023).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Mengacu pada tabel 4, bahwa variabel KI menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.0705. Nilai signifikansi yang lebih rendah dari 0.1 dan nilai koefisien yang dihasilkan sebesar -1.535391, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KI berpengaruh negatif terhadap FS. Hasil penelitian ini mendukung teori institusional karena teori ini menjelaskan bagaimana organisasi dan perusahaan terpengaruh oleh tekanan dan norma yang ada dalam lingkungan institusional mereka. Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh entitas besar yang biasanya memiliki prioritas pada keuntungan jangka pendek dan pengelolaan risiko yang konservatif.

Kepemilikan institusional yang lebih besar dapat menekan perusahaan untuk memprioritaskan pengembalian finansial yang cepat atau pengurangan biaya, seringkali dengan mengorbankan investasi dalam pembiayaan berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi, baik dari segi finansial maupun sosial. Oleh karena itu, hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan keuangan berkelanjutan mencerminkan tekanan dari norma institusional yang mendukung efisiensi jangka pendek, daripada keberlanjutan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh D. Setiawan et al. (2022) dan Derry & Vinola, (2021).

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusional Pada Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Dari tabel 4, variabel Kepemilikan Institusional tidak memoderasi hubungan positif tingkat kesehatan bank terhadap keuangan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat karena nilai signifikansi KI*TKB memiliki nilai sebesar 0.001 dan memiliki koefisien sebesar 9.261394. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.01, akan tetapi koefisien yang dihasilkan positif sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat ditolak.

Sesuai dengan hasil uji penelitian di atas, kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh positif tingkat kesehatan bank terhadap praktik Keuangan Berkelanjutan. Hal ini dapat terjadi karena kepemilikan institusional cenderung memiliki fokus jangka pendek terhadap kinerja perusahaan, termasuk stabilitas dan keberlanjutan keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori stakeholder, yang semestinya pemilik institusional memiliki

kepentingan untuk memastikan bahwa bank menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, nasabah, dan masyarakat, demi reputasi dan keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, hasil penelitian ini tidak mendukung teori institusional menjelaskan bahwa institusi keuangan yang memiliki bank cenderung memengaruhi praktik perusahaan agar sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku, termasuk standar keberlanjutan. Dengan adanya pemilik institusional, bank diharapkan lebih terdorong untuk menjaga tingkat kesehatan keuangannya, sehingga dapat mendukung keuangan berkelanjutan dengan praktik yang stabil dan bertanggung jawab, selaras dengan penelitian terdahulu oleh Tandoh et al., (2022).

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusional Pada Kinerja Keuangan Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan tabel 4, variabel KI*KK memiliki nilai signifikansi sebesar 0.102. lebih besar dari 0.1, dengan koefisien -5.300506 maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja Keuangan terhadap keuangan berkelanjutan.

Sesuai dengan hasil uji yang tertera di atas, variabel kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan Kinerja Keuangan terhadap praktik keuangan berkelanjutan. Hal tersebut dapat terjadi karena kemungkinan fokus utama pemilik institusional bisa saja hanya pada profitabilitas jangka pendek, tanpa memberikan perhatian khusus pada aspek keberlanjutan. Dalam perspektif teori stakeholder, pemilik institusional seharusnya memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, tetapi jika orientasi mereka terbatas pada hasil keuangan, maka dukungan untuk keberlanjutan mungkin menjadi kurang signifikan.

Sementara itu, teori institusional menunjukkan bahwa meskipun institusi memiliki pengaruh, mereka seringkali mengikuti praktik industri umum atau kebijakan perusahaan tanpa mendorong perubahan signifikan ke arah keberlanjutan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional bisa jadi tidak cukup kuat untuk mendorong perusahaan menerapkan praktik keuangan berkelanjutan ketika fokus utamanya pada pencapaian target finansial jangka pendek. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Derry & Vinola, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap keuangan berkelanjutan.

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Dari hasil pengujian yang terlampir di tabel 4, variabel kepemilikan institusional tidak mampu memperkuat pengaruh *Tax Avoidance* terhadap keuangan berkelanjutan. Dapat dikatakan demikian, karena nilai signifikansi variabel KI*TA memiliki nilai sebesar 0.182 dan nilai koefisiennya adalah sebesar -2.456865.

Sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan, variabel kepemilikan institusional tidak memperkuat hubungan *Tax Avoidance* terhadap praktik Keuangan Berkelanjutan. Hal itu terjadi karena fokus utama pemegang saham institusional cenderung lebih mengutamakan hasil finansial jangka pendek dibandingkan aspek keberlanjutan. Dalam konteks teori stakeholder, hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham institusional dapat lebih memprioritaskan kepentingan finansial mereka sendiri daripada kepentingan luas para pemangku kepentingan, seperti masyarakat atau lingkungan, yang menjadi inti dari keuangan berkelanjutan. Akibatnya, praktik penghindaran pajak, yang sering dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan laba perusahaan, mungkin tidak mendapatkan pengawasan tambahan dari institusi tersebut.

Menurut teori institusional, perilaku organisasi sering kali dipengaruhi oleh tekanan normatif. Namun, jika kepemilikan institusional tidak cukup kuat dalam mendorong perusahaan



untuk mematuhi norma keberlanjutan, maka praktik *tax avoidance* tidak akan terkait langsung dengan komitmen terhadap keuangan berkelanjutan. Ini mungkin terjadi karena tekanan normatif yang diberikan oleh institusi tidak cukup signifikan atau karena regulasi terkait keberlanjutan belum menjadi prioritas utama bagi institusi tersebut. Dengan demikian, moderasi oleh kepemilikan institusional dalam konteks ini tidak efektif dalam mengubah hubungan antara *tax avoidance* dan keuangan berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu oleh Li et al. (2022).

SIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan mengungkapkan kinerja keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap keuangan berkelanjutan dan kepemilikan institusional memperkuat pengaruh tingkat Kesehatan bank terhadap keuangan berkelanjutan.

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana kepemilikan institusional membentuk hubungan antara kinerja keuangan dengan keuangan berkelanjutan di pasar negara berkembang. Kinerja keuangan yang semakin baik akan mendukung penerapan dari keuangan berkelanjutan ditambah lagi jika ada kepemilikan institusional dalam perusahaan tersebut sehingga meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan.

Bagi pihak regulator yaitu OJK hendaknya memberikan dukungan atas penerapan keuangan berkelanjutan melalui peningkatan transparansi dan pelaporan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan perbankan khususnya dan perusahaan jasa keuangan lainnya, sehingga penerapan PJOK 51/POJK.03/2017 bukan hanya sekedar wacana saja akan tetapi dapat benar-benar dipraktekkan penerapan keuangan berkelanjutan tersebut sebagai sistem keuangan yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan data untuk pengukuran keuangan berkelanjutan dengan data sekunder, untuk penelitian berikutnya dapat dipadukan dengan menggunakan data primer yaitu dengan melakukan *interview* secara langsung kepada pihak yang berkepentingan seperti ojk maupun pihak perbankan. Sehingga dapat dikatakan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif atau *mixed method*.

REFERENSI

- Amidjaya, P. G., & Widagdo, A. K. (2020). Sustainability reporting in Indonesian listed banks: Do corporate governance, ownership structure and digital banking matter? *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 231–247.
- Andayani, W. (2023). Analisis Rasio Kecukupan Modal dan Kelonggaran Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, Dan Valuta)*, 3(1), 13–18.
- Bank BNI. (2022). *Bank BNI Sustainability Report 2022*. <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/SR-BNI-2022-ID-v1.pdf>
- Bank Mandiri. (2022). *Bank Mandiri Sustainability Report 2022*. https://Bankmandiri.Co.Id/Documents/38265486/0/SR+Mandiri+FEB_20+FEB+23.Pdf
- Bătae & Dragomir, & Feleagă, L. (2021). The relationship between environmental, social, and financial performance in the banking sector: A European study. *Journal of Cleaner Production*, 290, 125791.
- Beer, S., De Mooij, R., & Liu, L. (2020). International corporate tax avoidance: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Journal of Economic Surveys*, 34(3), 660–688.

- Data.goodstats.id. (2023). *Konsumsi BBM di Indonesia Meningkat pada 2022*. <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Fitrinurhdyh/Konsumsi-Bbm-Di-Indonesia-Meningkat-Pada-2022-ESja8>.
- Derry, W., & Vinola, H. (2021). Sustainable Finance Disclosure on Banking Sector in Indonesia: The Relationship Esg with Company Performance and Institutional Ownership. *Journal of Research in Business and Management*, 9(12), 6–12.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2023). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(4), 325–345.
- Francis Hutabarat, M. B. A. (2021). *Analisis kinerja keuangan perusahaan*. Desanta Publisher.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*.
- Georgios, K., & Elvis, K. (2019). Bank value using camels model evidence from Balkan's banking system. *International Research Journal of Finance and Economics*, 176, 182–195.
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2020). Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals: Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1633–1652.
- Indriyani, E. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 333–348.
- Karyani, E., & Obrien, V. V. (2020). Green Banking and Performance: The Role of Foreign and Public Ownership. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 221–234.
- Kolamban, D. V, Murni, S., & Baramuli, D. N. (2020). Analisis pengaruh leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan yang terdaftar di Bei. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3).
- Lammers, J. C., Garcia, M. A., Putnam, L. L., & Mumby, D. K. (2014). Institutional theory. *The SAGE Handbook of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and Methods*, 195–216.
- Li, Y., Al-Sulaiti, K., Dongling, W., Abbas, J., & Al-Sulaiti, I. (2022). Tax avoidance culture and employees' behavior affect sustainable business performance: the moderating role of corporate social responsibility. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 964410.
- Lusmeida, H., Siahaan, M. (2025). Combined Effect of Company Risk Management, Intellectual Capital and Shareholder Rights on Sustainable Finance in Indonesian Financial Service Sector. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(8), 3453-3467.
- Maheresmi, M., Probohudono, A. N., Arifin, T., & Widarjo, W. (2023). Do Tax Avoidance and Firm Ownership Matter for Sustainable Finance Disclosure? Evidence From the Listed Banks in Asean Countries. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), e01559–e01559.
- Mgbame, C. O., Chijoke-Mgbame, M. A., Yekini, S., & Yekini, C. K. (2017). Corporate social responsibility performance and tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(8), 101–108.
- Muttakin, M. B., & Subramaniam, N. (2015). Firm ownership and board characteristics: do they matter for corporate social responsibility disclosure of Indian companies? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 138–165.



- Octaviani, S., & Komalasari, D. (2017). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas Terhadap Harga Saham. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 4(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017*.
- Praptiningsih, P., Nastiti, H., & Nopiyanti, A. (2022). Analysis of Corporate Governance, Intellectual Capital, and Financial Performance Using Conventional Methods and Maqashid Sharia Index (MSI) on the Implementation of Sustainable Finance in Sharia Banking in Indonesia. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 3(4), 391–411.
- Pratomo, D., & Nuraulia, A. N. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan terhadap persistensi laba. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(1), 13–22.
- Saputri, K. O. (2019). Kinerja keuangan terhadap kemampuan berkelanjutan perusahaan. *JRAK*, 11(1), 24–32.
- Sari, D., & Tjen, C. (2017). Corporate social responsibility disclosure, environmental performance, and tax aggressiveness. *International Research Journal of Business Studies*, 9(2).
- Scott, W. R. (2010). Approaching adulthood: the maturing of institutional theory. *Theory and Society*, 37, 427–442.
- Setiawan, A. (2017). Analisis pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap Return on Asset. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(2), 130–152.
- Setiawan, D., Asrihapsari, A., Brahmana, R. K., Rizky, H. P., & Widawati, M. W. (2022). Role of family ownership in the relationship between corporate social responsibility and firm performance. *Complexity*, 2022.
- Sholikah, A. M., & Miranti, T. (2020). Factors influence financial sustainability banking in Indonesia. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 41–50.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tandoh, I., Duffour, K. A., Essandoh, M., & Amoako, R. N. (2022). Corporate governance, corporate social responsibility, and corporate sustainability: The moderating role of top management commitment. *International Journal of, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Corporate Sustainability: The Moderating Role of Top Management Commitment (February 7, 2022)*. Tandoh, I., Duffour, KA, Essandoh, M., & Amoako, RN.
- Mulia (2019). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing Dan Laba Bersih terhadap Financial Sustainability Ratio*.
- Willmott, H. (2015). Why institutional theory cannot be critical. *Journal of Management Inquiry*, 24(1), 105–111.